

**DADAN
HINDAYANA**

**PRABOWO
SUBIANTO**

SEBUAH PENELITIAN DARI **INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Ada siapa di balik MBG?

PATRONASE POLITIK DALAM MEMPERKUAT DUKUNGAN

POLITISI PENEGAK HUKUM MILITER RELAWAN PILPRES

EKS KORUPTOR HINGGA BIROKRAT

DI BALIK DAPUR MBG



Indonesia Corruption Watch
2025

Ada Siapa di Balik MBG?

Politik Patronase Untuk Memperkuat Dukungan

Egi Primayogha
Nisa Rizkiah
Seira Tamara
Yassar Aulia

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, 2025
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, 12740, Indonesia
www.antikorupsi.org

Daftar Isi

Pengantar	1
Metode dan Waktu Penelusuran	3
Dari Politically Exposed Persons (PEPs) Hingga Patronase	4
Temuan	7
Simpulan dan Rekomendasi	20

Pengantar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. MBG menjadi salah satu daftar janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2024 dan masuk sebagai satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.¹ Sejak dimulai pada Januari 2025, pemerintah menebar janji tinggi mengenai MBG, yaitu untuk memperbaiki status gizi, membebaskan anak Indonesia dari malnutrisi dan menekan angka *stunting*. Targetnya menjangkau 19,47 juta penerima manfaat di tahun 2025, dan menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026.²

Besarnya ambisi tersebut diikuti dengan kucuran dana jumbo untuk program MBG. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG hingga Rp71 triliun. Pada tahun 2026, pemerintah menambah anggaran MBG hingga lima kali lipat dengan alokasi mencapai Rp335 triliun.³

Meski begitu, anggaran masif tersebut tidak dibarengi dengan kualitas implementasi dan pengawasan yang baik. Dalam 10 bulan lebih pelaksanaan MBG, berbagai permasalahan mulai terungkap, termasuk minimnya transparansi. Informasi mengenai rincian anggaran, penyusunan peraturan, hingga data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak terbuka. Hal tersebut lalu mempersulit pengawasan publik untuk mendeteksi potensi penyimpangan.

Selain persoalan transparansi, masalah lain yang muncul adalah program MBG tidak dijalankan dengan payung hukum yang memadai. Program ini dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang mengatur mengenai tata kelola. Sejak awal program MBG dimulai, pemerintah hanya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Baru pada 17 November 2025 atau 10 bulan kemudian pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 115 tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

¹ Prabowosubianto.com, "8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran", <https://prabowosubianto.com/8-program-hasil-terbaik-cepat-prabowo-gibran/>

² Kompas, "Rp 335 Triliun Uang Pajak untuk MBG," <https://money.kompas.com/read/2025/10/09/100823726/rp-335-triliun-uang-pajak-untuk-mbg?page=all>.

³ *Ibid*

Ketiadaan regulasi tata kelola selama periode tersebut kemudian membawa pada ketidakteraturan, kebingungan terkait pemegang tanggung jawab lemahnya pengawasan, dan membuka peluang penyelewengan. Tak heran masalah-masalah lain kemudian bermunculan, seperti maraknya kasus keracunan siswa di berbagai daerah. Catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa hingga 19 Oktober 2025 telah ada 13.168 anak yang menjadi korban keracunan MBG.⁴ Jumlah tersebut lebih banyak dari klaim BGN yang menyatakan bahwa dari 41,6 juta penerima manfaat MBG, terdapat 11.640 korban keracunan.⁵

Selain masalah-masalah di atas, masalah lain yang tak kalah penting adalah program MBG yang rawan akan konflik kepentingan, patronase, dan kronisme. Program ini mudah dieksploitasi sebagai alat untuk merawat dan memperluas jejaring pendukung ataupun loyalis pemerintahan saat ini. Kerentanan ini semakin menguat dengan adanya temuan Tempo mengenai dugaan bahwa Presiden Prabowo sendiri, anggota keluarga, beserta kroninya terhubung dengan pelaksanaan program MBG lewat afiliasi terhadap salah satu yayasan yang didaftarkan menjadi mitra penyedia MBG.⁶ Data Tempo juga menunjukkan keterkaitan sejumlah politisi Partai Gerindra dalam pelaksanaan program MBG.

Tidak hanya keluarga dan orang terdekat Prabowo, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga turut serta dalam penyediaan SPPG. Hingga September 2025, sudah ada 452 unit SPPG yang dikelola oleh TNI tersebar di seluruh Indonesia.⁷ Jumlah tersebut akan terus bertambah, sebab institusi ini menargetkan sebanyak 2000 unit SPPG untuk didirikan.⁸ Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menyatakan mengelola 672 SPPG di seluruh Indonesia.⁹ Termasuk yang diselenggarakan melalui kerja

⁴ Tempo, "JPPI: Jumlah Korban Keracunan MBG Kembali Naik, Mencapai 13.168 Orang | tempo.co," <https://www.tempo.co/politik/jppi-jumlah-korban-keracunan-mbg-kembali-naik-mencapai-13-168-orang-2081242>

⁵ Kompas, "Bos BGN Sebut Penerima MBG Capai 41,6 Juta Orang, Ada 11.640 Orang Alami Keracunan," <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/12/22590541/bos-bgn-sebut-penerima-mbg-capai-41-6-juta-orang-ada-11640-orang-alami>.

⁶ Tempo, "Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis," <https://www.tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283>.

⁷ Tempo, "TNI Kini Kelola 452 SPPG untuk Proyek Makan Bergizi Gratis | tempo.co," <https://www.tempo.co/politik/tni-kini-kelola-452-sppg-untuk-proyek-makan-bergizi-gratis--2073861>

⁸ *Ibid*

⁹ Humas POLRI, "Kapolri Resmikan 32 SPPG dan Groundbreaking 27 SPPG Polri di Jateng, Terus Dukung Program MBG," <https://humas.polri.go.id/news/detail/2133997-kapolri-resmikan-32-sppg-dan-groundbreaking-27-sppg-polri-di-jateng-terus-dukung-program-mbg>.

sama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari di Polda maupun Polsek berbagai daerah.¹⁰

Berangkat dari berbagai masalah tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran untuk mengungkap praktik patronase serta keterlibatan *Politically Exposed Person* (PEPs) dalam pelaksanaan program MBG. Penelusuran ini kami anggap penting lantaran praktik patronase dan keterkaitan PEPs dengan program MBG dapat membuka ruang korupsi dan hanya menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara bebannya justru ditanggung oleh publik.

Dokumen ini terbagi atas empat bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang dan metode penelusuran. Bagian kedua memuat penjelasan teoritis atas konsep yang menjadi acuan, yang dilanjut ke bagian ketiga yaitu temuan. Sedangkan bagian keempat memuat simpulan dan rekomendasi.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan, terlihat dari hubungan yayasan pengelola SPPG dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum. Keterkaitan ini mengindikasikan dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik daripada manfaat untuk publik.

Metode dan Waktu Penelusuran

Informasi yang tertuang dalam penelitian ini dihasilkan dari proses pengumpulan data dan analisis yang dilakukan sejak Oktober 2025 hingga akhir November 2025. Kami mengumpulkan data sekunder untuk melakukan penelusuran sumber-sumber terbuka untuk memetakan keterkaitan aktor dengan pelaksanaan program MBG. Selain itu, kami mengumpulkan data primer melalui wawancara untuk mengetahui pelaksanaan program MBG secara umum.

ICW mengumpulkan daftar 220 yayasan yang berasal dari laman BGN dan beberapa pemberitaan media untuk ditelusuri lebih lanjut. Pemilihan

¹⁰ Yayasan Kemala Bhayangkari, "Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari Gelar Rapat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pengembangan SPPG," <https://yayasankemalabhayangkari.or.id/pengurus-pusat-yayasan-kemala-bhayangkari-gelar-rapat-program-makan-bergizi-gratis-mbg-dan-pengembangan-sppg/>.

yayasan yang ditelusuri dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan sebaran wilayah di seluruh Indonesia, ketersediaan sumber data, serta adanya indikasi keterkaitan dengan aktor tertentu. Data ini mengerucut menjadi 102 yayasan di 38 provinsi.

Analisis data dilakukan dengan mencocokkan informasi kepengurusan yayasan yang diperoleh dari akta yang diunduh secara resmi dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI. Selanjutnya dilakukan penelusuran keterkaitan aktor melalui dokumen publik, serta melakukan verifikasi silang untuk memastikan akurasi. Hasil analisis kemudian diolah untuk mengidentifikasi hubungan dan potensi patronase serta konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.

Dari Politically Exposed Persons (PEPs) Hingga Patronase

Politically Exposed Persons (PEPs)

Politically Exposed Persons (PEPs) merujuk pada individu yang pada saat ini atau sebelumnya pernah memegang fungsi-fungsi publik penting. Mengacu pada kategorisasi Financial Action Task Force (FATF), ini mencakup diantaranya: kepala negara atau pemerintahan, politisi, pejabat pemerintah, pejabat di cabang yudisial atau militer, eksekutif dari perusahaan milik negara, hingga anggota partai politik.¹¹ Laporan ini juga mengkategorikan individu yang terhubung dengan PEP secara langsung (seperti melalui hubungan kekeluargaan) maupun yang terasosiasi secara tidak langsung (seperti secara sosial maupun profesional) sebagai PEP.

Identifikasi PEPs menjadi penting untuk dilakukan. Sebab, akibat fungsi maupun pengaruh yang dimilikinya, PEPs telah diakui secara global memiliki risiko lebih besar untuk terjerumus pada situasi-situasi seperti pencucian uang maupun korupsi jika tidak diiringi dengan mekanisme pencegahan dan penanggulangan khusus.

¹¹ Financial Action Task Force, *Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*, Guidance (2013), <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf.coredownload.pdf>.

Patronase

Patronase secara umum merupakan sebuah sistem atau hubungan timbal balik antara pihak yang disebut dengan “patron” dan “klien.” Patron dalam konteks ini merupakan individu yang menggunakan pengaruh, posisi sosial, atau atribut lainnya untuk membantu atau melindungi individu lain yang kemudian menjadi kliennya.¹² “Klien” ini kemudian akan membalas tindakan “patron” tersebut dengan jasa-jasa tertentu.

Dalam konteks studi pemerintahan, patronase dapat dipahami sebagai pengisian jabatan-jabatan publik yang cenderung dilakukan dengan motif politis ketimbang dengan pertimbangan kompetensi. Dengan kata lain, patronase dapat merujuk pada “politisasi administrasi publik.” Pengisian jabatan publik dengan loyalis dapat dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku pelayanan publik sesuai preferensi aktor politik atau sebagai bentuk “balas budi” atas dukungan elektoral.¹³

Pada awalnya, sistem patronase memang dikenal sebagai “*spoils system*.” Ini mengacu pada sebuah praktik politik abad ke-19 di Amerika Serikat saat satu partai politik memenangkan pemilu, mereka akan selalu memberikan *spoils* (hadiah) bagi para pendukungnya melalui jabatan-jabatan publik.¹⁴ Namun dalam perkembangannya, patronase tidak terbatas pada konteks bagi-bagi jabatan semata. Dalam konteks Indonesia kekinian, patronase dapat berbentuk pembayaran melalui uang tunai (suap untuk mendapatkan posisi), kemudahan akses terhadap anggaran pemerintah, kontrak atau proyek pemerintah, pengaruh terhadap pengisian jabatan pemerintah, memperpanjang periode jabatan yang diemban, hingga konsesi-konsesi perizinan usaha.¹⁵ Pada intinya, demokrasi yang terjangkit dengan patronase akan secara rutin memperdagangkan keuntungan material dalam bentuk apapun dengan imbalan dukungan politik.¹⁶ Dengan kata lain, patronase membuat praktik-praktik korup seperti perburuan rente (*rent-seeking*) menjadi mengakar demi mempertahankan manfaat yang didapatkan.¹⁷

¹² Alex Weingrod, “Patrons, Patronage, and Political Parties,” *Comparative Studies in Society and History* 10, no. 4 (1968): 377.

¹³ B. Guy Peters dkk., ed., *Handbook of Politicization and Political Patronage* (Edward Elgar Publishing, 2025), <https://doi.org/10.4337/9781035326242>.

¹⁴ Olle Folke, *Parties, power and patronage: papers in political economy* (Department of Economics, Stockholm University, 2010), https://www.su.se/polopoly_fs/1.57468.1321520835!/66.pdf.

¹⁵ Adrianus Hendrawan dkk., “Parties as pay-off seekers: Pre-electoral coalitions in a patronage democracy,” *Electoral Studies* 69 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102238>. hlm. 1–2.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ John A. Dove dan Noah Trudeau, “Corruption Perceptions, The Pendleton Act, and Sovereign Borrowing Costs,” SSRN Scholarly Paper no. 5740504 (Social Science Research Network, 12 November 2025), <https://doi.org/10.2139/ssrn.5740504>.

Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan merupakan situasi ketika seseorang atau organisasi memiliki kepentingan yang saling bertentangan dan justru melayani satu kepentingan yang dapat berdampak buruk bagi kepentingan atau tanggung jawab lainnya.¹⁸ Bentuk kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan finansial maupun dalam hal lain. Adapun konflik kepentingan dapat saja bersifat aktual, potensial, maupun terkesan.

Secara konseptual, konflik kepentingan tidak serta merta merujuk pada sebuah perbuatan salah, namun keberadaannya dapat menghadirkan potensi untuk melakukan perbuatan tidak patut—seperti memanfaatkan posisi publik untuk kepentingan privat.¹⁹

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi ketika pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.²⁰ Secara lebih rinci, UU Administrasi Pemerintahan mengkategorisasi konflik kepentingan menjadi:²¹

- a. kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
- c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
- e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan

¹⁸ “Pedoman tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI),” t.t., <https://baselgovernance.org/sites/default/files/2023-11/20230922%20-%20ID%20-%20USAID%20INTEGRITAS%20COI%20Guidelines.pdf>.

¹⁹ Quentin Reed, *Sitting on the Fence* (Chr. Michelsen Institute (CMI), 2008), 6, <https://www.cmi.no/publications/file/3160-sitting-on-the-fence.pdf>.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, No. 30/2014, Pasal 1 Nomor 14

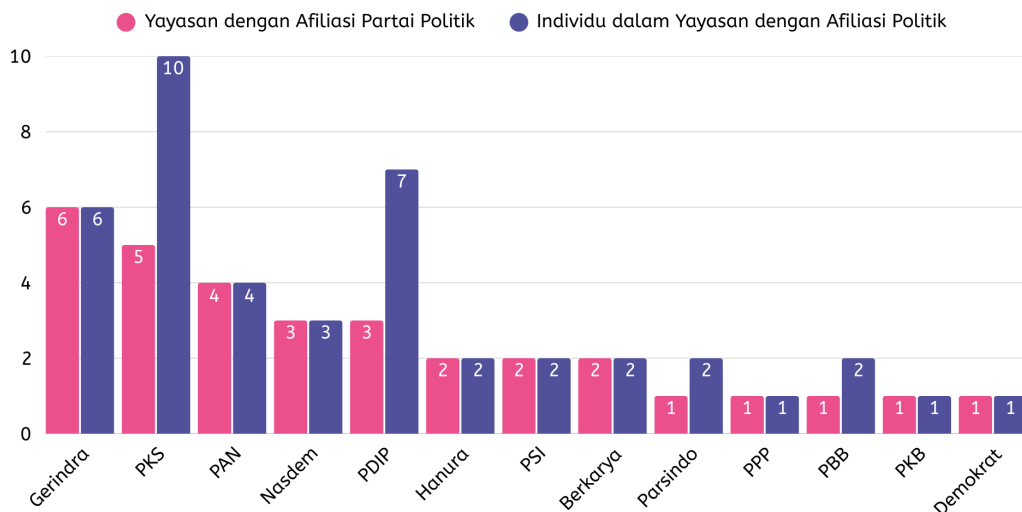
²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, No. 30/2014, Pasal 43 ayat (1)

Bagian ini akan menjabarkan temuan dari penelusuran yang dilakukan. Temuan diklasifikasi menjadi 9 jenis, yaitu hubungan yayasan pelaksana MBG dengan politik formal, aparat penegak hukum, militer, politik lainnya, pemerintahan/birokrasi, mantan penyelenggara negara, orang dekat pejabat, afiliasi bisnis/swasta, dan keterkaitan dengan kasus korupsi.

Politik Formal

Dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, terdapat 27,45% atau 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik formal. Afiliasi ini timbul dari dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik. Relasi tersebut meliputi kedudukan dalam partai politik berupa jabatan sebagai pengurus pusat dan daerah, pengusungan oleh partai politik dalam kontestasi pemilu²², maupun status sebagai pejabat publik yang terpilih melalui pemilu.

Tidak hanya partai yang mendapatkan kursi legislatif nasional, partai dengan kursi di daerah juga ditemukan dalam kategori ini. Dari 28 yayasan, sebanyak 7 yayasan terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ini menempatkan Partai Gerindra sebagai partai yang paling banyak terafiliasi dengan yayasan mitra MBG dengan persentase 25%. Pada urutan berikutnya diisi oleh PKS dengan afiliasi terhadap 5 yayasan (17,8%), dan PAN dengan afiliasi terhadap 3 yayasan (10,7%). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



²² Pengusungan partai terhadap individu dalam kontestasi pemilu di tahun 2014, 2019, dan 2024.

Grafik 1: Data yayasan dan individu yang memiliki afiliasi dengan partai politik

Grafik di atas menunjukkan afiliasi politik pada yayasan mitra MBC. Hal ini dapat dilihat dari jumlah individu dalam yayasan yang diduga memiliki keterkaitan dengan parpol, serta banyaknya yayasan yang baik pendiri, pengawas, maupun pengurusnya terafiliasi dengan partai. Individu yang dimaksud adalah bagian dari yayasan yang terdiri dari pendiri, pengawas, maupun pengurus.

Bila dihitung berdasarkan jumlah individu dalam yayasan yang terafiliasi dengan partai, terdapat 44 individu dari 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik. Tiga posisi teratas dengan afiliasi terbanyak diisi oleh PKS dengan afiliasi sebanyak 10 orang (35,7%). Setelah PKS terdapat PDI-P dengan afiliasi terhadap 7 individu (25%), dan Gerindra dengan 6 individu (21,4%).

Pada kategori ini, baik pendiri, pengurus, maupun pembina suatu yayasan dapat terafiliasi dengan partai yang berbeda-beda. Ini menjadikan yayasan tertentu dapat dimasukkan ke penghitungan afiliasi lebih dari satu partai. Penelusuran ini juga menemukan empat orang anggota legislatif periode 2024–2029 yang menjadi bagian dari yayasan mitra MBC. Diantaranya:

- a. Asep Rahmat, anggota DPRD Ciamis dari Partai PAN sebagai ketua Yayasan Asra Bakti Maritim;
- b. Raden Muhammad Nizar, anggota DPRD Garut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai ketua sekaligus pengawas Yayasan Cahaya Wirabangsa;
- c. Sulaeman Lessu Hamzah anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai pengawas dan anggota Yayasan Insan Cendikia Jayapura; serta
- d. Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.

Selain empat nama-nama anggota legislatif aktif di atas, penelusuran dalam kategori ini juga menemukan informasi terkait yayasan yang keseluruhan strukturnya ditempati oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Yayasan tersebut adalah Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Terdapat pula mantan kepala daerah terpilih dan kontestan dalam pemilihan kepala daerah yang namanya tercatat dalam akta sebagai pendiri dari Yayasan Lazuardi Kendari. Mereka adalah Nur Alam dan

Mohammad Zayat Kaimoeddin. Nur Alam merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode yang menjabat sejak tahun 2008 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Tidak sampai rampung jabatan periode keduanya, Nur Alam tersangkut korupsi perizinan tambang nikel dengan kerugian negara Rp 4,3 triliun pada 2016.²³

Sedangkan Zayat Kaimoeddin pernah mengikuti Pilkada Kota Kendari pada tahun 2017, meski tidak terpilih. Dirinya juga merupakan putra dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Kaimoeddin yang menjabat sejak tahun 1992 hingga 2003.²⁴

Aparat Penegak Hukum

Terdapat dua yayasan yang memiliki keterkaitan dengan aparat penegak hukum yaitu Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang diduga terhubung dengan individu dalam Kejaksaan RI dan Yayasan Kemala Bhayangkari yang diduga terhubung dengan individu dalam Kepolisian RI.

Sejak April 2025, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa diketahui menginisiasi program MBG di berbagai sekolah. Yayasan tersebut mengklaim program tersebut sebagai MBG-Swasta.²⁵ Adapun Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan seluruh pelaksanaan MBG pasti berafiliasi dan sudah melewati proses verifikasi oleh BGN. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada SPPG yang berada di luar sistem yang dijalankan oleh BGN.²⁶

Dua dari lima orang pendiri Yayasan Inklusi Pelita Bangsa adalah Reda Manthovani dan Denny Achmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu.

Yayasan Kemala Bhayangkari terafiliasi dengan Polri melalui hubungan keluarga dari ketua dan pembina yayasan ini. Ketua Yayasan Kemala

²³ Detik News, "MA: Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Rugikan Negara Rp 4,3 Triliun" <https://news.detik.com/berita/d-5297379/ma-mantan-gubernur-sultra-nur-alam-rugikan-negara-rp-4-3-triliun>

²⁴ Antara News, "Putra Mantan Gubernur Sultra Deklarasi Calon Walikota - ANTARA News Sulawesi Tenggara," <https://sultra.antaranews.com/berita/282747/putra-mantan-gubernur-sultra-deklarasi-calon-walikota>.

²⁵ Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, "Makanan Bergizi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Langkah Nyata YIPB Bangun Inklusi Lewat Program MBG-Swasta" <https://inkluspelitabangsa.com/makanan-bergizi-untuk-anak-berkebutuhan-khusus-langkah-nyata-yipb-bangun-inklusi-lewat-program-mbg-swasta/>

²⁶ Wawancara dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, 28 November 2025

Bhayangkari adalah Martha Dwi Maryani, istri dari Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Sedangkan pembina dari yayasan ini terdiri dari dua orang yaitu Juliati Sapta Dwi M yang merupakan istri dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Diana Wahyuni yaitu istri dari Ahmad Dofri. Ahmad Dofri sendiri merupakan mantan Wakapolri periode 2024-2025 yang saat ini menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk Reformasi Polri.

Militer

Bagian ini akan memaparkan temuan mengenai dugaan keterkaitan militer dengan program MBG. Adapun yang dimaksud dengan militer dalam bagian ini yaitu individu yang merupakan militer aktif dan individu yang pernah menjadi anggota militer namun telah pensiun atau tidak lagi aktif.

Dari 102 yayasan yang ditelaah, terdapat enam yayasan yang memiliki afiliasi dengan militer, baik yang masih aktif maupun telah melalui masa purna tugas. Enam yayasan tersebut yaitu:

1. Yayasan Adi Upaya
2. Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya
3. Yayasan Kartika Purna Yudha
4. Yayasan Manunggal Kartika Jaya
5. Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan
6. Yayasan Mualaf Indonesia Timur

Dari keenam yayasan tersebut muncul nama menteri, mantan menteri, serta pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan. Mereka adalah Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard, Sjafrie Sjamsoeddin, Musa Bangun, dan Rui Fernando Guedes.

Ryamizard yang terafiliasi dengan Yayasan Mualaf Indonesia Timur merupakan Mantan Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo di tahun 2014–2019.²⁷ Pada yayasan ini, ia menjabat sebagai ketua sekaligus pembina. Sebelum pensiun dari tugas kemiliteran di tahun 2008, Ryamizard pernah menempati berbagai posisi militer, antara lain Kepala Staf Kodam Sriwijaya, Pangdam Brawijaya, Panglima Divisi 2/Kostrad, Kepala Staf TNI AD tahun 2002–2005, dan pernah dicalonkan Presiden Megawati sebagai Panglima TNI.²⁸

²⁷ Viva, "Profil Ryamizard Ryacudu," <https://www.viva.co.id/siapa/read/79-jenderal-tni-purn-ryamizard-ryacudu>.

²⁸ *Ibid*

Selain itu, terdapat Sjafrie Sjamsoeddin yang terafiliasi dengan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan yang diisi seluruhnya oleh individu dengan latar belakang militer. Sjafrie yang tercatat sebagai ketua yayasan merupakan Menteri Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk periode 2024-2029.²⁹ Sebelumnya ia juga pernah mengemban posisi Wakil Menteri Pertahanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2010-2014.³⁰

Selain Sjafrie, di dalam Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan terdapat Musa Bangun, purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD yang juga tercatat sebagai ketua yayasan. Musa adalah Wakil Ketua Umum Gerindra yang pada Juni 2025 lalu dilantik sebagai Komisaris Utama dan Independen PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).³¹

Dalam Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, juga terdapat nama lainnya yang terafiliasi militer. Diantaranya Rui Fernando Guedes yang merupakan Letnan Jenderal TNI AD aktif dan sedang menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.³² Kemudian, Eddy Syahputra Siahaan yang merupakan purnawirawan Mayor Jenderal TNI AD, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Len Industri (Persero).³³ Serta Anas Djoko Setiadji selaku purnawirawan Brigadir Jenderal TNI, dan Tri Budi Utomo yang merupakan Letnan Jenderal TNI aktif yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan.³⁴

Politik Lainnya

Penelitian ini juga menelusuri bentuk afiliasi politik lain di luar jabatan struktural formal partai. Afiliasi ini meliputi pemberian dukungan secara terbuka, keterlibatan sebagai tim kampanye, organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun kelompok relawan yang terlibat dalam upaya

²⁹ Kompas, "Menteri Pertahanan RI 2024-2029 Sjafri Sjamsoeddin," <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/menteri-pertahanan-ri-2024-2029-sjafri-sjamsoeddin>.

³⁰ *Ibid*

³¹ CNN, "Waketum Gerindra Musa Bangun Diangkat Jadi Komut Inalum," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250612151622-92-1239059/waketum-gerindra-musa-bangun-diangkat-jadi-komut-inalum>.

³² Tribun News, "Profil Letjen TNI Rui F.G.P Duarte, Jebolan Akmil 1993 yang Kini Jabat Irjen Kemhan - TribunNews.com," <https://www.tribunnews.com/nasional/7753889/profil-letjen-tni-rui-fgp-duarte-jebolan-akmil-1993-yang-kini-jabat-irjen-kemhan>.

³³ Len, "Komisaris - Eddy Syahputra Siahaan - PT Len Industri (Persero)," <https://www.len.co.id/dewan-komisaris/komisaris-eddy-syahputra-siahaan/>.

³⁴ "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://www.kemhan.go.id/ректор-unhan/pimpinan>.

pemenangan pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Presiden.

Ditemukan 9 yayasan yang terafiliasi dengan Mantan Presiden Joko Widodo, Prabowo - Gibran, dan Anies - Muhaimin. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- *Ormas/Relawan Pendukung Prabowo Gibran*

1. Yayasan Indonesia Food Security Review

Yayasan ini terafiliasi dengan Relawan Muda Prabowo - Gibran, Balai Dewan Pakar Prabowo, dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Pembina dari yayasan ini adalah Hanief Adrian, ia merupakan Sekretaris Jenderal Relawan Muda Prabowo - Gibran (RMPG).³⁵ Selain itu, terdapat Glory Harimas Sihombing yang menjabat sebagai koordinator Balai Dewan Pakar Prabowo³⁶, dan Burhanuddin Abdullah Mantan Gubernur Bank Indonesia yang menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.³⁷

2. Yayasan Al-Ishlah Bondowoso

Salah satu pendiri dan pembina dari yayasan ini adalah KH. Thoha Yuusf Zakariya. Ia juga merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Ishlah Bondowoso yang bersama para kiyai dan ulama se-Tapal Kuda mendukung kemenangan Prabowo di Pilpres 2024.³⁸

3. Yayasan Darul Ilhamiyah Nusantara

Pendiri dan Ketua Yayasan ini adalah Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar, yang menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran Polewali Mandar.³⁹

³⁵ Viva, "Relawan Muda Prabowo Gibran Minta Three Big Push Dilakukan di Indonesia," <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1674427-relawan-muda-prabowo-gibran-minta-three-big-push-dilakukan-di-indonesia?page=2>.

³⁶ Rmol.id, "Alumni ITB: Banyak Anak Muda Antusias dengan Visi Prabowo-Gibran," Rmol.id, <https://rmol.id/politik/read/2024/01/25/606757/alumni-itb-banyak-anak-muda-antusias-dengan-visi-prabowo-gibran>.

³⁷ Kompas, "Profil Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN yang Jadi Komut PLN, Pernah Terseret Kasus Korupsi BI," <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/25/083000365/profil-burhanuddin-abdullah-ketua-dewan-pakar-tnk-yang-jadi-komut-pln?page=all>.

³⁸ Partai Gelora Indonesia, *Kiai dan Ulama se-Tapal Kuda Sepakat Menangkan Prabowo di Pilpres 2024*, <https://www.partaigelora.id/tag/kh-thoha-yusuf-zakariya/>.

³⁹ Inews, "Lantik TKD Prabowo-Gibran di Polman, SDK Optimis Kekuatan Tokoh Jadi Modal Kemenangan,"

4. Yayasan Bowo Garuda Indonesia
Salah satu dari ketua dari yayasan ini yaitu Devy Alexander Tendeen terafiliasi dengan Relawan NGOPI (Ngobrolin Prabowo-Gibran untuk Indonesia).⁴⁰
 5. Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya
Eko Djalmo Asmadi yang menjadi salah seorang pembina dari yayasan ini merupakan Ketua Umum merupakan Ketua Umum Badan Relawan Prabowo (BRP).⁴¹
- *Ormas/Relawan Pendukung Joko Widodo*
 1. Yayasan Berkat Gemilang Nusantara
Di dalam yayasan ini, terdapat dua orang pengurus yayasan yang terafiliasi dengan kelompok relawan pendukung Joko Widodo. Mereka adalah Andre J.O. Sumual dan Cliff Alfred Alexander Repi. Dilansir dari laman *Linkedin* nya, Andre mencatatkan diri sebagai Ketua Umum Relawan Teman Jokowi.⁴² Sedangkan Cliff merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Setia-Jokowi 2024-2029.⁴³
 2. Yayasan Organisasi Masyarakat Sipil Barisan Rakyat Peduli Muhtadin Bahar, pengawas dari yayasan ini merupakan Ketua Umum DPP Setia Jokowi.⁴⁴
 - *Ormas/Relawan Pendukung Anies - Muhaimin*
 1. Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Di Tanah Papua
Salah seorang ketua sekaligus pembina dari yayasan ini bernama Thaha M. Alhamid. Ia merupakan salah satu juru bicara tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies - Muhaimin.⁴⁵

<https://mamuju.inews.id/read/387784/lantik-tkd-prabowo-gibran-di-polman-sdk-optimis-kekuatan-tokoh-jadi-modal-kemenangan>.

⁴⁰ Rmol.id, "Dukung Prabowo-Gibran, Relawan Ngopi Siap Kawal Keberlanjutan Pembangunan Nasional,"

<https://rmol.id/politik/read/2024/02/07/608459/dukung-prabowo-gibran-relawan-ngopi-siap-kawal-keberlanjutan-pembangunan-nasional>.

⁴¹ Antara, "Pengukuhan Badan Relawan Prabowo Riau,"

<https://www.antarafoto.com/id/view/2044770/pengukuhan-badan-relawan-prabowo-riau>.

⁴² <https://www.linkedin.com/in/andreopa/details/experience/>

⁴³ Tribun News, "Relawan 'Setia' Jokowi Terbentuk di Sulsel, Afner Rerung: Kami Lahir dari Rahim Rakyat,"

<https://makassar.tribunnews.com/2024/09/02/relawan-setia-jokowi-terbentuk-di-sulsel-afner-rerung-kami-lahir-dari-rahim-rakyat>.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ CNN, "Kaesang Temui Jubir Timnas AMIN Thaha Alhamid di Papua,"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231127105931-617-1029489/kaesang-temui-jubir-timnas-amin-thaha-alhamid-di-papua>.

2. Yayasan Insan Cendikia Jayapura

Di dalam yayasan ini terdapat Sulaeman Lessu Hamzah, yang menjabat sebagai pengawas sekaligus anggota yayasan. Ia merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang juga pernah tergabung dalam Tim Nasional Pemenangan Anies - Muhaimin dalam Pemilihan Presiden 2024.⁴⁶

Pemerintahan/Birokrasi

Ditemukan 12 yayasan yang terafiliasi dengan jabatan pemerintahan atau birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara rinci, lima yayasan terafiliasi dengan lembaga pemerintah di tingkat pusat. Di dalamnya termasuk dua yayasan yang pendirinya menjabat sebagai tenaga ahli di Badan Gizi Nasional.

Yayasan yang terafiliasi dengan Badan Gizi Nasional, antara lain adalah Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR). Pendirinya adalah I Dewa Made Agung Kertha yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, dan salah seorang pengurusnya ialah Alfatehan Septianta yang juga menjabat sebagai Tim Teknis Badan Gizi Nasional.

Selain IFSR, terdapat pula yayasan mitra MBG yang terafiliasi dengan Badan Gizi Nasional, yaitu Yayasan Yayasan No Fito Timor yang didirikan oleh Florencio Mario Vieira. Florencio menjabat sebagai Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional.

Pada kategori ini juga terdapat nama Lenis Kogoya, Mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo pada tahun 2015–2019 dengan posisi sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan. Saat ini dirinya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Pada Maret 2025, dalam posisinya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, ia pernah mengunjungi persiapan dapur umum MBG di Wamena, Papua Pegunungan.

N o	Nama Yayasan	Nama Individu - Jabatan dalam Yayasan	Lembaga yang Terafiliasi
--------	--------------	--	-----------------------------

⁴⁶ Tribun News, "Timnas AMIN Terbentuk, Ada Nama Sulaeman L Hamzah: Ini Profil dan Posisinya!"
<https://papua.tribunnews.com/2023/11/22/timnas-amin-terbentuk-ada-nama-sulaeman-l-hamzah-ini-profil-dan-posisinya>.

1	Yayasan Indonesia Food Security Review	I Dewa Made Agung Kertha - Pendiri; Alfatehan Septianta - Pengurus	Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional; Tim Teknis Badan Gizi Nasional
2	Yayasan No Fito Timor/Yayasan No Fitu Timor	Florencio Mario Vieira - Pendiri	Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional
3	Yayasan Prabu Center Kosong Delapan	Lenis Kogoya - Pendiri	Stafsus Menhan - Kementerian Pertahanan
4	Yayasan Suyono Mihartawijaya	Rudi Rubijaya - Pendiri dan Pembina	Direktur Landreform - Kementerian ATR/BPN
5	Yayasan Kitong Bisa	Billy Mambrasar - Pendiri	Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Sedangkan terdapat tujuh yayasan lainnya yang terafiliasi dengan jabatan di tingkat daerah:

No	Nama Yayasan	Nama Individu - Jabatan dalam Yayasan	Lembaga yang Terafiliasi
1	Bentang Banyumas Sejahtera	Purwadi Santoso - Pengawas	Pemda Banyumas
2	Yayasan Al Futuwah Kandangan	Daru Priyanto - Pengawas & Anggota; Tafrinsyah - Anggota	Dinas Kesehatan Hulu Sungai Selatan; Pemda Hulu Sungai Selatan
3	Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Di Tanah Papua	Mohammad Musa'ad - Ketua; Fachruddin Pasolo - Ketua	Pemda Papua Barat Daya (Pj); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
4	Yayasan Toyoda Mahwu Jaya	Rifkhi Prima Rusman - Pengawas	Pemkot Padang

5	Yayasan Lazuardi Kendari	Rony Yakob - Pendiri; Zayat Kaimoeddin - Pendiri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Tenggara; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Pembkab Muna (Pj)
6	Yayasan Pendidikan Islam Pinang Seribu	Masdar Amin - Pendiri, Ketua, dan Pembina	Kementerian Agama Kota Samarinda
7	Yayasan Abdi Bangun Negeri	Abdul Hamid Payapo - Pendiri, Ketua, dan Pembina	Dirjen Bina Marga Maluku

Mantan Penyelenggara Negara

Terdapat empat yayasan yang terdiri dari mantan penyelenggara negara. Diantaranya:

1. Yayasan Muallaf Indonesia Timur: Ketua merangkap pembina dari yayasan ini adalah Ryamizard. Ia adalah mantan Menteri Pertahanan tahun 2014-2019;
2. Yayasan Indonesia Food Security Review: Pengawas dari yayasan ini adalah Burhanuddin Abdullah, Mantan Menteri Koordinator Perekonomian tahun 2001;
3. Yayasan Salam Mughni Abadi: Ketua dari yayasan ini yaitu Bambang Rantam Sariwanto merupakan Mantan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011-2013;
4. Yayasan Lazuardi Kendari: Salah satu pendiri dari yayasan ini adalah Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013.

Orang Dekat Pejabat

Terdapat tujuh yayasan yang memiliki afiliasi dengan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara secara langsung dan tidak langsung melalui hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan.

No	Nama Yayasan	Nama Individu - Jabatan dalam Yayasan	Afiliasi
1	Yayasan Naraya Jati Luhur	Siswanda Harso Sumarto - Pendiri dan ketua yayasan	Suami dari Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI Periode 2024-2029
2	Yayasan Indonesia Food Security Review	Glory Harimas Sihombing - Ketua Yayasan	Pengurus PT Agrinas bersama Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia
3	Yayasan Adinda Karunia Ilahi	Yuniati Adinda Noviany Kiryanti Aurelia Ramadhani Kiryanti Alayla Muharani Kiryanti - Pendiri Yayasan	Keluarga dari Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya 2025-2030 H. Sukiryanto, S.Ag
4	Yayasan Pemuda Santri Aceh Barat	Zulkifli Andi Govi - Pendiri Yayasan	Saudara dari Bupati Aceh Barat Tarmizi
5	Yayasan Lazuardi Kendari	Andi Norma Kaimoeddin - Pendiri Yayasan; Mohammad Zayat Kaimoeddin - Pendiri dan Pengurus Yayasan	Istri dan anak dari Mantan Gubernur Sultra 1992-2003, La Ode Kaimoeddin
6	Yayasan Muallaf Indonesia Timur	Ryamizard R.C. - Ketua dan Pembina Yayasan	Menantu dari Try Soetrisno, Mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden RI ke-6

Afiliasi Bisnis/Swasta

Terdapat 18 yayasan yang di dalamnya diisi oleh orang dengan bisnis di sektor yang beragam. Dari 18 yayasan tersebut, terdapat 28 individu yang terhubung dengan bisnis. Sektor dari afiliasi bisnis ini beragam mulai dari kuliner, tambang emas, bisnis penyedia *foodtray*, telekomunikasi, perikanan, media, dan lain sebagainya. Secara rinci, afiliasi bisnis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sektor Bisnis	Jumlah Individu
----	---------------	-----------------

		Terafiliasi
1	Kulinari	5
2	Tambang Emas	2
3	Penyedia Ompreng / <i>Foodtray</i>	2
4	Telekomunikasi	2
5	Perikanan	2
6	<i>Fintech</i>	1
7	Media	1
8	Properti	1
9	Perkebunan	1
10	Makanan Instan	1
11	Perpupukan - petrokimia	1
12	<i>Hospitality</i>	1
13	Agroteknologi	1
14	Konstruksi	1
15	Otomotif	1
16	Sawit	1
17	Olahraga	1
18	Kecantikan	1
19	Belum dapat diidentifikasi	2

Pada kategori ini juga didapati temuan menarik yaitu pada Yayasan Inklusi Pelita Bangsa. Di dalam yayasan tersebut teridentifikasi lima individu berlatar belakang pebisnis. Andreas Reza Nazaruddin dan Maya Miranda Ambarsari yang tercatat sebagai pendiri sekaligus pembina yayasan, merupakan konglomerat yang paling dikenal sebagai pendiri dari PT

Merdeka Copper Gold. Terdapat pula pengawas yayasan, Adithya Prakarsa Winata, yang merupakan anak dari taipan Tomy Winata, pemilik Grup Artha Graha. Adithya juga memiliki jabatan sebagai *board chairman* dari KAJA Group. Kemudian, pengawas yayasan lainnya, Karaniya Dharmasaputra merupakan CEO dan pendiri dari Bareksa dan VIVA News. Terakhir, Cahaya Manthovani selaku ketua harian yayasan dan juga anak dari Reda Manthovani, tercatat sebagai direktur eksekutif dari PT Bumi Serang Asri.

Keterlibatan Dalam Kasus Korupsi

Dalam penelusuran ini, ditemukan sedikitnya tiga yayasan yang baik pendiri maupun pengurusnya memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi. Yayasan tersebut adalah:

a. Yayasan Lazuardi Kendari

Dua dari sembilan orang yang tercatat secara resmi sebagai pendiri dari yayasan ini adalah Nur Alam dan Mohammad Zayat Kaimoeddin. Nur Alam adalah mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang terlibat suap izin pertambangan dengan kerugian negara mencapai Rp4,3 Triliun.⁴⁷ Sedangkan Zayat pernah terlibat dalam kasus korupsi peningkatan mutu SLTP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pada tahun 2003.⁴⁸

b. Yayasan Abdi Bangun Negeri

Pendiri yayasan ini adalah Abdul Hamid Payapo. Pada tahun 2017 lalu, Abdul Hamid terlibat dalam kasus korupsi proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Secara spesifik, kasus tersebut berkaitan dengan pengaturan dan perencanaan pengadaan barang/jasa serta penetapan pemenang pelaksana proyek di wilayah Maluku dan Maluku Utara.⁴⁹

c. Yayasan Indonesia Food Security Review

Dalam yayasan ini terdapat Burhanuddin Abdullah, yang tercatat sebagai pengawas. Ia adalah Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga pernah Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional

⁴⁷ Detik News, "MA Kembali Tolak PK Eks Gubernur Sultra Nur Alam yang Korupsi Rp 4,3 Triliun," <https://news.detik.com/berita/d-5867095/ma-kembali-tolak-pk-eks-gubernur-sultra-nur-alam-yang-korupsi-rp-4-3-triliun>.

⁴⁸ Media Indonesia, "Disesalkan Demokrat Calonkan Napi Korupsi di Pilkada Serentak," <https://mediaindonesia.com/nusantara/64755/disesalkan-demokrat-calonkan-napi-korupsi-di-pilkada-serentak>.

⁴⁹ Hukum Online, "Atur Proyek, Kepala BPJN IX Didakwa Terima Belasan Miliar," <https://www.hukumonline.com/berita/a/atur-proyek--kepala-bpjn-ix-didakwa-terima-belasan-miliar-lt5863b09630fc0/>.

Prabowo-Gibran. Pada tahun 2008, Burhanuddin divonis lima tahun penjara dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 Miliar kepada para mantan petinggi dan anggota DPR.⁵⁰

Simpulan dan Rekomendasi

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan. Hal ini tercermin dari hubungan individu di yayasan penyelenggara dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum.

Keterkaitan ini mengindikasikan adanya dugaan distribusi sumber daya atau akses tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik. Selain itu, pola ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas dukungan politik. Ini lantaran penerima akses dan manfaat cenderung membalas budi dengan memberikan loyalitas dan dukungan kepada pihak pemberi kemudahan. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik ketimbang memberi manfaat bagi publik.

Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan penelusuran yang menunjukkan bahwa yayasan-yayasan pengelola SPPG tidak memiliki relevansi, kompetensi, dan kualifikasi dalam memberikan makanan kepada penerima manfaat MBG. Contohnya, sejumlah yayasan justru terafiliasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan POLRI, serta militer. Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari institusi tersebut secara jelas tidak berkaitan dengan giat pengolahan pangan, serta peningkatan kesehatan dan gizi. Adanya afiliasi yayasan penyedia MBG yang mengarah ke institusi tersebut justru menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat jejaring patronase di berbagai lini termasuk pada sektor penegakan hukum dan militer patut diduga sedang terjadi.

Afiliasi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada standar yang jelas untuk memilih dan menentukan yayasan sebagai mitra BGN. Ketiadaan standar kompetensi ini juga tercermin dari munculnya afiliasi bisnis para individu dalam yayasan yang justru bergerak di bidang non pangan ataupun kesehatan. Seperti bisnis properti, telekomunikasi, konstruksi, hingga pertambangan.

⁵⁰ Tempo "Sosok Burhanuddin Abdullah dari Gubernur BI, Tersangka KPK, TKN Prabowo, hingga Komisararis Utama PLN | tempo.co," <https://www.tempo.co/ekonomi/sosok-burhanuddin-abdullah-dari-gubernur-bi-tersangka-kpk-tkn-prabowo-hingga-komisaris-utama-pln-36800>.

Di sisi lain, temuan bahwa sejumlah yayasan terafiliasi dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi mengindikasikan bahwa program ini tidak mempertimbangkan prinsip integritas dan antikorupsi. Hal ini sekaligus memperkuat dugaan bahwa pemilihan mitra lebih dipengaruhi oleh kedekatan politik dan afiliasi daripada rekam jejak etika.

Tanpa mempertimbangkan hal tersebut, maka potensi penyelewengan semakin terbuka lebar. Terlebih, anggaran negara yang dikelola berjumlah besar. Setiap SPPG disebutkan bisa mengelola anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.⁵¹ Dengan batas maksimal SPPG yang dapat dikelola berjumlah 10 unit per yayasan, artinya setiap yayasan berpotensi mengelola hingga Rp 10 miliar per bulan. Bila yayasan penyedia SPPG justru diisi oleh orang yang pernah terlibat kasus korupsi, jaminan bahwa anggaran MBG dikelola secara tepat guna akan semakin sulit dicapai.

Temuan juga menunjukkan masalah tata kelola MBG dengan adanya dugaan keterlibatan yayasan yang terafiliasi dengan BGN. Tenaga ahli dan tim teknis BGN yang ikut menjadi penyedia MBG menunjukkan bahwa upaya mekanisme pengawasan program dan pengendalian konflik kepentingan tidak pernah menjadi perhatian. Apalagi, dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, tugas BGN disebutkan berkaitan dengan fungsi pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pengawasan BGN terhadap pelaksanaan program berisiko sulit diwujudkan ketika terdapat individu dalam BGN yang ikut menjadi eksekutor program. Individu dalam BGN tersebut menghadapi konflik kepentingan lantaran independensi dan efektivitas pengawasan berpotensi terpengaruh.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, program MBG sangat berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik dan memperkuat jaringan patronase. Oleh karena itu, rekomendasi tegas yang kami ajukan adalah menghentikan program MBG dan mengalokasikan anggarannya untuk kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.

⁵¹ Antara News, "BGN: 8.018 SPPG telah beroperasi dengan serapan anggaran Rp15,7 triliun - ANTARA News," diakses 26 November 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5111137/bgn-8018-sppg-telah-beroperasi-dengan-serapan-anggaran-rp157-triliun>.

